

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, peneliti paparkan simpulan sebagai berikut:

5.1.1 Kondisi Faktual Pelaksanaan Pendidikan Inklusif tingkat sekolah dasar yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kebijakan sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah menunjukkan sikap positif dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sekolah menerima anak berkebutuhan khusus yang ada disekitar sekolah berdasarkan kerjasama dengan *Non -Government Organization (NGO) Center for Disaster Risk Management and Community Development Studies (CDRM&CDS)* serta orang tua siswa. Penerimaan anak berkebutuhan khusus didasarkan sikap sekolah untuk bisa memberikan layanan pendidikan untuk semua anak. Anak berkebutuhan khusus ditempatkan sekelas dengan siswa lainnya, dan pembelajarannya diserahkan kepada guru dengan koordinasi bersama pihak sekolah. Minimnya fasilitas sekolah, serta belum adanya regulasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten, tidak menyurutkan niat sekolah, dan tetap memberanikan diri untuk menerima anak pendidikan khusus.

Beragam sikap yang ditunjukkan terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Namun semuanya menerima anak berkebutuhan khusus dan menghargai keberadaan anak. Tidak terjadi diskriminasi di sekolah, serta anak berkebutuhan khusus diberikan layanan semaksimal kemampuan guru dan sesuai dengan kondisi sekolah.

Praktik pendidikan inklusif di sekolah belum terlaksana sesuai dengan konsep pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Belum adanya identifikasi dan asesmen yang terukur kepada anak. Anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum yang sama dengan anak dikelasnya. Pembelajaran masih

bersifat *classical*, dan tidak ada modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak berkebutuhan khusus kewalahan dalam mengikutinya. Guru memberikan pengayaan materi setelah pulang sekolah. Guru masih bingung dalam memberikan pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus karena kurangnya sosialisasi tentang pendidikan khusus

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kurangnya sosialisasi serta informasi yang didapatkan oleh pihak sekolah tentang pendidikan inklusif sehingga pelaksanaan disekolah masih sebatas menerima saja. Sekolah di daerah terpencil mengalami keterbatasan dalam pembangunan serta penyediaan media aksesibilitas terhadap anak. Namun keberanian sekolah untuk mau menerima harus diapresiasi dan diakomodir untuk bisa dikembangkan pendidikan inklusif yang ideal sesuai dengan kondisi daerah. Belum adanya program yang dikembangkan sekolah serta arahan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, membuat pelaksanaan selama ini masih berjalan ditempat. Belum adanya sekolah lain untuk menjadi rujukan, menjadikan 9 sekolah yang telah menerima anak berkebutuhan khusus ini harus diberikan program pendampingan agar menjadi pionir pelaksanaan pendidikan inklusif di Kab. Kep. Mentawai

5.1.3 Program pengembangan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar yang tepat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pegembangan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kab. Kep Mentawai melalui program yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan dan penyamaan pemahaman tentang pendidikan inklusif, konsep keragaman anak dalam pendidikan inklusif, serta praktik pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga dengan pemahaman yang baik, sekolah bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa memberikan layanan pendidikan inklusif yang baik. Keberhasilan program ini akan menjadikan sekolah percontohan, dan menjadi

dasar untuk bisa membuat payung hukum dan rencana strategis pengembangan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan di Kab. Kep. Mentawai

Kurangnya sosialisasi serta informasi yang didapatkan oleh pihak sekolah tentang pendidikan inklusif sehingga pelaksanaan disekolah masih sebatas menerima saja. Sekolah di daerah terpencil mengalami keterbatasan dalam pembangunan serta penyediaan media aksesibilitas terhadap anak. Namun keberanian sekolah untuk mau menerima harus diapresiasi dan diakomodir untuk bisa dikembangkan pendidikan inklusif yang ideal sesuai dengan kondisi daerah. Belum adanya program yang dikembangkan sekolah serta arahan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, membuat pelaksanaan selama ini masih berjalan ditempat. Belum adanya sekolah lain untuk menjadi rujukan, menjadikan 9 sekolah yang telah menerima anak berkebutuhan khusus ini harus diberikan program pendampingan agar menjadi pionir pelaksanaan pendidikan inklusif di Kab. Kep. Mentawai.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini memberikan informasi mengenai perumusan program pengembangan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, maka dari itu peneliti memberikan rekomendasi kepada:

5.2.1 Bagi Sekolah selaku penyelenggara pendidikan inklusif, serta pihak sekolah yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa menjadikan rujukan dalam pemberian pemahaman tentang pendidikan inklusif, sehingga bisa memiliki kesiapan dalam meberikan pelayanan terhadap anak berkebtuhan khusus, serta meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru agar bisa merancang dan berkolaborasi untuk proses belajar dan mengajar yang responsible terhadap kebutuhan anak serta pembudayaan nilai inklusif di sekolah. Keberhasilan sekolah dalam menjalani program pendampingan ini dengan komitmen dan kesungguhan akan menjadikan sekolah percontohan nantinya untk pengembangan pendidikan inklusif di daerah terpencil, khususnya untuk daerah lain di Kab. Kep. Mentawai.

5.2.2 Bagi Pemerintah/Pemangku Kebijakan

Dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten dapat menjadikan bahan masukan untuk bisa merancang program strategis dan grand desain untuk pendidikan inklusif di Kab. Kepulauan Mentawai. Dinas pendidikan diharapkan dapat memberikan penguatan dalam hal fasilitas serta pengadaan workshop untuk peningkatan kapasitas sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Serta bisa mendukung sekolah lain untuk bisa melaksanakan pendidikan inklusif. Pemerintah diharapkan menyiapkan perda pendidikan inklusif sebagai pegangan untuk sekolah tetap melaksanakan pendidikan inklusif.

5.2.3 Masyarakat bisa memberikan dukungan terhadap terlaksananya pendidikan inklusif di sekolah dan saling menghargai keberagaman kondisi peserta didik.

5.2.4 Peneliti selanjutnya, agar melakukan melaksanakan program pendampingan ini dengan bekerjasama dengan dinas pendidikan dan sekolah sehingga rancangan program ini bisa terelaksanakan dan bisa diuji keefektifan program dilapangan. Sehingga bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.